

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Humam. 2004. *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*. Ciputat: WADI Press.
- Ahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada. Dalam <http://repository.uir.ac.id/1839/1/HUKUM%20ACARA%20PIDANA%20EDISI%20I.pdf>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Hadi, Sutrisno. 1979. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, Muhammad Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Koto, Alauddin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ni'ami, Mutimatun. Syaifuddin Zuhdi dan Muhammad Junaidi. 2018. *Pengantar Hukum Islam*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2021. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung; Sumur Bandung.
- Qamar, Nurul. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Cv. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarno, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Syarifuddin, Muhammad. 2020. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemic Covid-19*. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya.
- Syatar, Abdul dan Ahmad Abubakar. 2020. *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia)*. Romangpolong: Alauddin Universitas Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

Jurnal dan Penelitian

- Arafatsyah. 2019. "Konsep Kepemimpinan (Menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59 Dalam Pandangan Ulama)". *Skripsi*. Dalam http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5402/1/612015110_BAB%20I_DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf.
- Dewi, Architia. 2017. "Kepastian Hukum Batas Waktu Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Penjara Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan KUHAP

- Jo UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*". Skripsi. Dalam <http://repository.unpas.ac.id/33146/6/BAB%203.pdf>. Diakses pada 23 Febuari 2022. Pukul 19.00 WIB.
- Fadjar, Otto Restu. 2014. "Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Adil dan Layak (*Due Process Model*) (Sebuah Telaah Sosiologi Hukum)". *Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka*. Vol. 8, No. 3, September- Desember.
- Fajriana, Norika. 2018, "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan". *Badamai Law Journal*. Vol. 3, Maret. Dalam <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6058/4985>
- Maharani, Riska Nur. 2020. Kriteria Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Pbg). Skripsi. Dalam [Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/9937/1/Cover Bab%20i Bab%20v Daftar%20pustaka.Pdf](Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/9937/1/Cover_Bab%20i_Bab%20v_Daftar%20pustaka.Pdf).
- R, Marwa. 2017. "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)", Skripsi. Dalam <Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/5155/1/Marwa%20r.Pdf>
- Ramiluddin. 2016. "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Drs. H. A. Rahman Kaoy". Skripsi. Dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/3697/3/Ramiluddin.pdf>.
- Razaq, Nur Akmal. 2020. "Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid – 19 dalam Pespektif Hukum Pidana". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1. No. 6. Nopember.
- Rochman, Muhammad Ibnu. 1996. "Hukum Islam: Analisis dalam Sudut Pandang Filsafat". *Jurnal Filsafat*. Februari. Dalam https://www.academia.edu/37693930/Makalah_Hukum_Islam.
- Satyayudhadananjaya, Nyoman. 2014. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) Dikaji dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian". *Vyavahara Duta*. Vol. IX, No. 1, September.
- Siregar Damayanti, Ruth Marina. 2014. "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana". Skripsi. Dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4218/2694>.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2017. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensiyan Hukum Islam : Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan". *Misykat*. Vol. 02, No. 02.
- Surbakti, Natangsa. 2010, "Penegakan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". *Media Hukum*. Vol. 17, No. 2, Desember.
- Triantono. 2021. "Kualitas Pembuktian pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik". *Jurnal Untidar*. Vol. 5, No.1.
- Wijaya, Sumirat. 2019. "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (*SPDP*) yang Bertentangan dengan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dihubungkan dengan Asas Peradilan Cepat". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dalam <http://repository.unpas.ac.id/40742/>.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. 2018. “Konsep Maqshid Syariah Menurut Al Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”. *Al-Falah Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2. Dalam https://www.researchgate.net/publication/330413167_Konsep_Maqashid_Syariah_Menurut_Al-Syatibi_Dan_Kontribusinya_Dalam_Kebijakan_Fiskal.

Lain-lain

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/990/5/Bab%202.pdf>. Diakses pada 11 Januari 2022

Almanhaj. *Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat Yang Lebih Besar Harus Didahulukan*. Dalam <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>. Diakses pada tanggal 9 Febuari 2022, Pukul 20.24 WIB

Arief, Barda Nawari. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Dalam <https://Eprints.Umm.Ac.Id/46131/3/BAB%20II.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2022.

Artikel Pendidikan. 2019. *Tujuan, Tugas dan Sistem Hukum Acara Pidana*. Dalam <https://artikelpendidikanrpp.blogspot.com/2019/12/tujuan-tugas-dan-sistem-hukum-acara.html>. Diakses Pada tanggal 30 September 2021, Pukul 18.58 WIB.

Asfihan, Akbar. 2021. *Telenconference adalah*. Dalam <https://adalah.co.id/teleconference/>, Diakses 7 Oktober 2021, Pukul 14.21 WIB.

Baskoro, Bambang Dwi. 2006. *Buku Ajar: Hukum Eksekusi Pidana*. Dalam http://eprints.undip.ac.id/39283/1/BK.AJAR_EKSEKUSI_PIDANA_BambangDwiBaskoro.pdf. Diakses pada 23 Febuari 2022. Pukul 09.40 WIB.

Fakhriah, Efa Laela dan Yusrizal. 2014. *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*. Dalam <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kewenangan-Mahkamah-Syariyah.pdf>. Diakses pada 1 Januari 2022.

Hamid, Irfan. 2019. Dalam <https://makalahirfan.blogspot.com/2019/03/hukum-yang-berlaku-bagi-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 21.42 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata Telekonferensi, Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telekonferensi>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *E-court Mahkamah Agung RI*. Dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses Pada tanggal 30 September 2021, Pukul 18.07 WIB.

Mahkamah Agung RI. *Pengadilan Negeri Ponorogo: Alur Perkara Pidana*. Dalam <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/alur-perkara-pidana>. Diakses pada 23 Febuari 2022. Pukul 20.22 WIB.

- Megawati dan Arlianah. 2019. *Konsep Fikih Muamalah*, Dalam <https://www.researchgate.net/publication/336225554> **KONSEP FIKIH MUAMALAH**. Diakses pada tanggal 22 November 2021, Pukul 20.07 WIB.
- Sujana, I Ketut. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/7784fe0b6f094905f040ee96242a0b6b.pdf. Diakses pada tanggal 14 Januari 2022, Pukul 21.14 WIB.
- Tarmizi, Erwandi. 2007. *Konsep Jihad Islam*. Dalam http://download.media.islamway.net/articles/id/id_jihad_in_islam.pdf. Diakses pada tanggal 11 Febuari 2022, Pukul 09.25 WIB.
- World Health Organisation (WHO), *Coronavirus Disease (COVID-19) Advice For The Public*, Dalam https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1ho.int, Diakses Pada tanggal Senin, 6 September 2021, Pukul 20.36 WIB.

Perundang-undangan

- QS. Al A'nam ayat 108.
- QS. Al-Ma'idah ayat 49
- QS. An-Nissa ayat 135.
- QS. Az Zariyat ayat 56.
- QS. An Nahl ayat 15
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
- Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui *Teleconference*.
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Kata Sambutan Prof.Syahrizal Abbas dalam Qanun Hukum Acara Jinayah.